

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019



PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II

Jl. Jend. Suprapto No. 1
Komplek Pemda Tanggamus,
Kota Agung, Kabupaten Tanggamus



info.pnkta@gmail.com



(0722) 22141



pn-kotaagung.go.id

KATA PENGANTAR

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 - 2019

Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporanini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Kota Agung, Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA AGUNG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
 BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung	8
2. Mis Pengadilan Negeri Kota Agung	9
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	11
B. Perjanjian Kinerja	12
- Rencana Kinerja	19
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung	21
B. Realisasi Anggaran	51
 BAB IV Penutup	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
 Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Kota Agung	
2. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2020	

3. SK Tim penyusunan LKjIP Tahun 2019
4. Dokumentasi Penyusunan LKjIP 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama Tahun 2019 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” Tahun 2019 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Kota Agung, telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar **Rp3.498.989.000,00** (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung selama Tahun 2019. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran,

diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa “*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*”.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri, berfungsi dan terpisah dari Pengadilan induknya yakni Pengadilan Negeri Kalianda sejak Bulan Oktober 2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura yang ditandatangani dan ditetapkan oleh DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Presiden RI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005.

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Lembaga Penegak Hukum di wilayah hukum di 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan eksternal lainnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peradilan sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu mempunyai 6 (enam) fungsi utama organisasi yaitu:

a. Fungsi Peradilan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Wilayah di Provinsi Lampung, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Provinsi Lampung diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili

antarpengadilan negeri didaerah hukumnya (Pasal 33 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

b. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis Keperkaraan (Yudisial) dan administrasi (Non Yudisial).
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung juga melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

d. Fungsi Nasihat.

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Lainnya.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan dibawahnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

e. Fungsi Administratif

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kota Agung

(Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

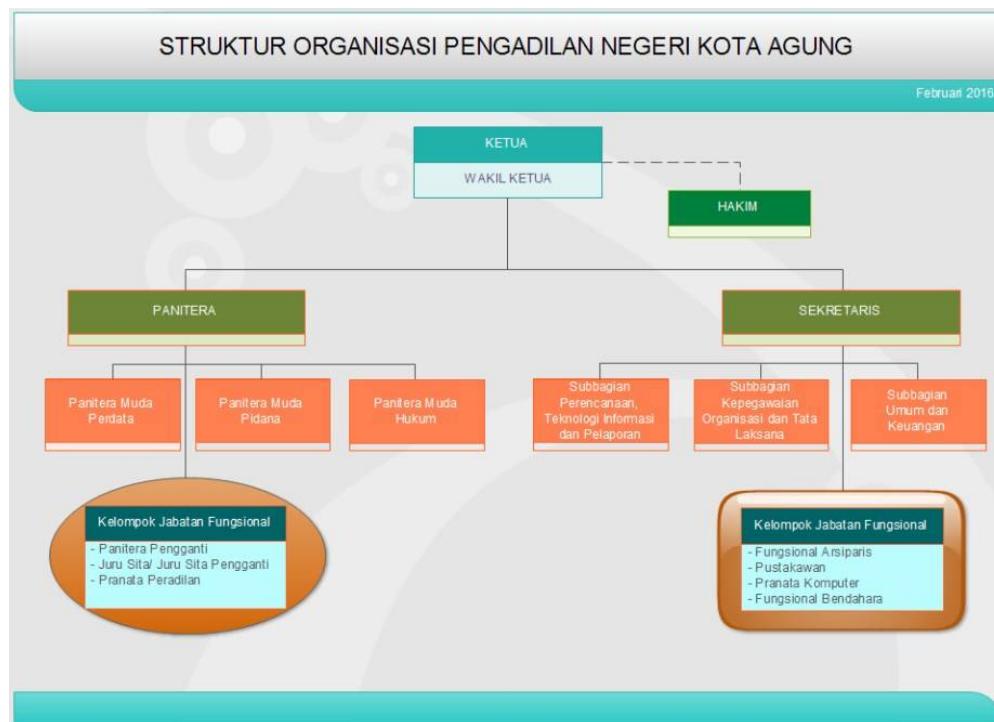
Bagan Organisasi pada Pengadilan Negeri Kota Agung Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
7. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita
 - c. Jurusita Pengganti

9. Pelaksana (Staf)

Struktur organisasi secara rinci tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2018, dengan bentuk sajian seperti berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2019.

BAB I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Kota Agung dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain: a.

Latar Belakang; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam Tahun Anggaran 2019 yang berisikan antara lain: a. Rencana Strategis; yang mendeskripsikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan Pokok; b. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019.

BAB III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang terdiri dari: a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dan; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang Kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan; b. Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain: 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Tahun 2020, 3. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2019, 4. Dokumentasi Penyusuan LKjIP Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga Peradilan Umum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG”.

2. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Negeri Kota Agung secara khusus,

sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Negeri Kota Agung berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Agung;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota Agung.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu3. Prosentase penurunan sisa Perkara4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG Tahun 2019

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

Pengadilan Negeri Kota Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan reviu terakhir pada Tahun 2019 yaitu:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Agung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara: sisa perkaratahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p><u>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</u></p> <p>Tn.1</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <p>Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p><u>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><u>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</u></p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang, di Upload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Prodeo</u> Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u> Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> x 100% <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u> Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	--

- **Rencana Kinerja Tahun 2019**

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kota Agung memuat angka target kinerja Tahun 2019 untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadikomitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 30%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Perdata - Pidana	95% 100%
		- Kasasi - Perdata - Pidana	98% 100%
		- PK - Perdata - Pidana	100% 100%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) dan Badan Peradilan Umum (03) Tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.483.719.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp3.324.319.000,00
2.	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp38.000.000,00
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Rp121.400.000,00
Jumlah		Rp3.483.719.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2019, 4 (empat) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir Tahun 2019 sebagai berikut:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100.00% 100.00%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata	90% 90%	100% 100%	111.11% 111.11%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 30%	-85.71% -2.44%	-1714.2% -8.13%

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	95% 100% 98% 100% 100% 100%	100% 97.42% 98.61% 98.36% 100.00% 100.00%	105.26% 97.42% 100.62% 98.36% 100% 100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	11.11%	222.22%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	92.63%	102.92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 15% 100% 100%	100.00% 8.33% 100.00% 100.00%	100% 59.52% 100% 100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100%	100.00% 100.00% 100.00%	100% 100% 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada Tahun 2019. Namun demikian disisi lain di point persentase penurunan sisa perkara terdapat kenaikan yang sangat besar ini disebabkan **perkara masuk di akhir Tahun (bulan Desember 2019) tinggi** yaitu 37 perkara. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2019, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Adapun jumlah perkara yang ditangani dalam Tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel rekapitulasi perkara di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Perkara Tahun 2019

Tahun 2019													
No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Gugatan	3	28	20	71.43%	11	-	1	-	-	-		
2	Permohonan	2	37	37	100.00%	2	-	-	-	-	-		
3	Kepailitan	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-		
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-		
5	Hak Kekayaan intelektual	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-		
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-		
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-		
8	Gugatan Sederhana	2	13	15	115.38%	-	-	-	-	-	-		

9	Pidana Biasa	39	389	386	99.23%	42	5	3	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Cepat	-	3	3	100.00%	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lalu-Lintas	-	11379	11379	100.00%	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	2	36	37	102.78%	-	6	4	-	-	-
14	Pidana Praperadilan	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
Total Pidana (Tanpa Pidana Lalu-lintas)		41	428	426	99.53%	42	11	8	-	-	-
Total Perdata		7	78	72	92.31%	13	-	1	-	-	-

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2019

Pidana Biasa											
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	39	38	44	115.79%	33	-	-	-	-	-
2	Pebruari	33	41	27	65.85%	47	1	-	-	-	-
3	Maret	47	27	40	148.15%	34	1	-	-	-	-
4	April	34	32	28	87.50%	38	-	2	-	-	-
5	Mei	38	24	45	187.50%	17	-	-	-	-	-
6	Juni	17	11	2	18.18%	26	-	1	-	-	-
7	Juli	26	40	26	65.00%	40	-	-	-	-	-
8	Agustus	40	35	38	108.57%	37	-	-	-	-	-
9	September	37	47	43	91.49%	41	1	-	-	-	-
10	Oktober	41	24	32	133.33%	33	-	-	-	-	-
11	November	33	41	20	48.78%	54	1	-	-	-	-
12	Desember	54	29	41	141.38%	42	1	-	-	-	-
Jumlah			389	386	99.23%		5	3	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2019

Pidana Anak												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	2	4	2	50.00%	4	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	4	8	7	87.50%	5	-	-	-	-	-	
3	Maret	5	4	8	200.00%	1	4	-	-	-	-	
4	April	1	2	3	150.00%	-	-	3	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	5	-	0.00%	5	-	-	-	-	-	
8	Agustus	5	4	7	175.00%	2	1	-	-	-	-	
9	September	2	3	3	100.00%	2	-	-	-	-	-	
10	Oktober	2	2	3	150.00%	1	-	-	-	-	-	
11	November	1	-	1	100.00%	-	1	-	-	-	-	
12	Desember	-	4	4	100.00%	-	-	1	-	-	-	
Jumlah			36	38	105.56%			6	4	-	-	

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2019

Pidana Singkat												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	-	0.00%		-	-	-	-	-	

Tabel Rekapitasi Perkara Pidana Cepat Tahun 2019

Pidana Cepat												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	2	2	100.00%	-	-	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Jumlah			3	3	100.00%		-	-	-	-	-	

Tabel Rekapitasi Perkara Perkara Lalu-lintas Tahun 2019

Perkara Lalu-Lintas												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	-	871	871	100.00%	-	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	-	622	622	100.00%	-	-	-	-	-	-	
3	Maret	-	406	406	100.00%	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	490	490	100.00%	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	511	511	100.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	307	307	100.00%	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	751	751	100.00%	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	-	1201	1201	100.00%	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	2212	2212	100.00%	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	1471	1471	100.00%	-	-	-	-	-	-	
11	November	-	1561	1561	100.00%	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	976	976	100.00%	-	-	-	-	-	-	
Jumlah			11379	11379	100.00%		-	-	-	-	-	

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Tahun 2019

Perdata Gugatan												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	3	4	-	0.00%	7	-	1	-	-	-	
2	Pebruari	7	1	2	200.00%	6	-	-	-	-	-	
3	Maret	6	1	3	300.00%	4	-	-	-	-	-	
4	April	4	6	1	16.67%	9	-	-	-	-	-	
5	Mei	9	-	2	200.00%	7	-	-	-	-	-	
6	Juni	7	1	-	0.00%	8	-	-	-	-	-	
7	Juli	8	2	1	50.00%	9	-	-	-	-	-	
8	Agustus	9	2	4	200.00%	7	-	-	-	-	-	
9	September	7	2	-	0.00%	9	-	-	-	-	-	
10	Oktober	9	5	3	60.00%	11	-	-	-	-	-	
11	November	11	1	2	200.00%	10	-	-	-	-	-	
12	Desember	10	3	2	66.67%	11	-	-	-	-	-	
Jumlah			28	20	71.43%		-	1	-	-	-	

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019

Perdata Permohonan												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	2	3	3	100.00%	2	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	2	1	3	300.00%	-	-	-	-	-	-	
3	Maret	-	5	5	100.00%	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	1	-	0.00%	1	-	-	-	-	-	
5	Mei	1	1	2	200.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	1	-	0.00%	1	-	-	-	-	-	
7	Juli	1	3	3	300.00%	1	-	-	-	-	-	
8	Agustus	1	5	4	80.00%	2	-	-	-	-	-	
9	September	2	6	5	83.33%	3	-	-	-	-	-	
10	Oktober	3	8	9	112.50%	2	-	-	-	-	-	
11	November	2	5	3	60.00%	4	-	-	-	-	-	
12	Desember	4	1	3	300.00%	2	-	-	-	-	-	
Jumlah			40	40	100.00%		-	-	-	-	-	

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2019

Perdata Gugatan Sederhana												
No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	PK	Ekse kusi	Grasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	2	-	2	200.00%	-	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	-	3	-	0.00%	3	-	-	-	-	-	
3	Maret	3	-	3	300.00%	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	5	1	20.00%	4	-	-	-	-	-	
7	Juli	4	1	5	500.00%	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	-	1	1	100.00%	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	3	3	100.00%	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		13	15	115.38%	-	-	-	-	-	-	-	

Pada akhir Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ini diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 yangtercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100% 100%	100.00% 100.00% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata	90% 90%	100% 100%	111.11% 111.11%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 30%	-85.71% -2.44%	-1714.2% -8.13%

	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PK <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	95% 100%	100% 97.42%	105.26% 97.42%
	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	5%	11.11%	222.22%
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	95%	92.63%	102.92%

Analisis keenam indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	100%	100.00%	100%
	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}}$$

Catatan :

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

-Target Persentase sisa perkara **perdata** yang diselesaikan Tahun 2019 adalah **100%**, sisa perkara **perdata** Tahun 2018 adalah **7** perkara terdiri dari **7** perkara perdata gugatan, permohonan dan gugatan sederhana, sisa perkara **perdata Tahun 2018** yang diselesaikan di Tahun 2019 ada **7** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} = \frac{7 \times 100\%}{7} = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} = 100\%$$

-Target Persentase sisa perkara **pidana** yang diselesaikan Tahun 2019 adalah **100%**, sisa perkara Tahun **pidana** 2018 adalah **40** perkara terdiri dari **39** perkara pidana biasa dan 1 perkara pidana Anak, sisa perkara **pidana Tahun 2018** yang diselesaikan di Tahun 2019 ada **40** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} = \frac{40 \times 100\%}{40} = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} = 100\%$$

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

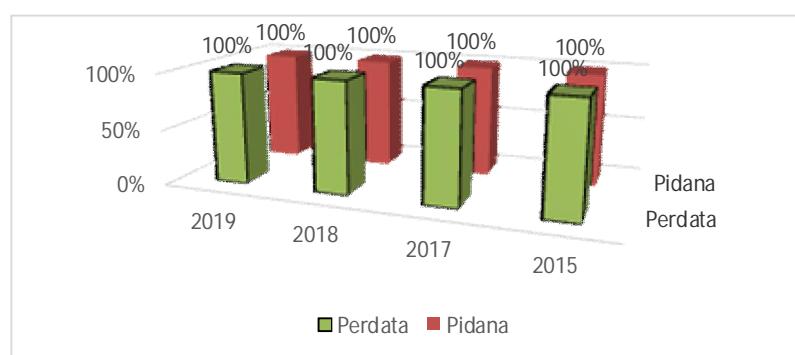
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2018	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2017	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2016	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Diselesaikan Tahun Berjalan
2019	- Perdata	7	7
	- Pidana	40	40
2018	- Perdata	9	9
	- Pidana	10	10
2017	- Perdata	15	15
	- Pidana	37	37
2016	- Perdata	66	66
	- Pidana	44	44

Grafik Perbandingan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 baik pidana maupun perdata jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik Tahun 2019 maupun Tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - perdata - pidana	100% 100%

Realisasi kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 baik pidana maupun perdata jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada Tahun 2019 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerjapersentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tahun 2019 dikarenakan perkara perdata yang masuk dapat diselesaikan di bawah satu tahun.
- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan Tahun 2019 dikarenakan persidangan perkara pidana dilaksanakan dengan tepat waktu.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari

keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 baik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019 baik perkara pidana maupun perdata.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90%	100%	111.11%
- Pidana	90%	100%	111.11%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Catatan :

- perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

-Target persentase perkara **perdata** yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 adalah **90%**, jumlah perkara **perdata** yang ada Tahun 2019 adalah **85** perkara terdiri dari **7** perkara sisa Tahun 2018 dan **78** perkara

yang masuk Tahun 2019, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan Tahun 2019 ada 72 perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi: Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan 100% = 72 x 100% =84.71%
Jumlah Perkara yang Ada 85

Capaian: Realisasi x 100% = 84.71% x 100% = 94.12%
Target 90%

-Target persentase perkara **pidana** yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 adalah **90%**, jumlah perkara **pidana** yang ada Tahun 2019 adalah **469** perkara terdiri dari **41** perkara sisa Tahun 2018 dan **428** perkara yang masuk Tahun 2019, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan Tahun 2019 ada 426 perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi: Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan 100% = 426 x 100% =90.84%
Jumlah Perkara yang Ada 469

Capaian: Realisasi x 100% = 90.84% x 100% = 100.93%
Target 90%

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

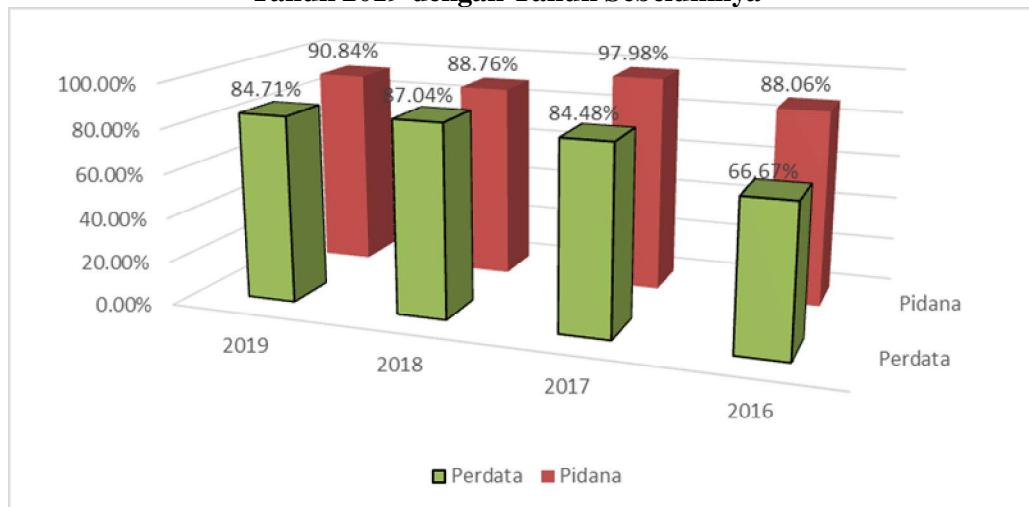
Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	- Perdata	90%	84.71%	94.12%
	- Pidana	90%	90.84%	100.93%
2018	- Perdata	87%	87.04%	100.04%
	- Pidana	87%	88.76%	102.02%

2017	- Perdata - Pidana	84% 84%	84.48% 97.98%	100.57% 116.65%
2016	- Perdata - Pidana	81% 81%	66.67% 88.06%	82.03% 108.72%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk Tahun Berjalan	Yang Diselesaikan Tahun Berjalan
2019	- Perdata - Pidana	7 41	78 428	72 426
2018	- Perdata - Pidana	9 10	45 337	47 308
2017	- Perdata - Pidana	15 37	43 459	49 486
2016	- Perdata - Pidana	6 44	39 266	30 273

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 menurun.

- Realisasi kinerja persentase **perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 meningkat.
- Capaian kinerja persentase **perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 berhasil (perdata 94.12%, pidana 100.93%).

Perbandingan **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase sisa perkara yang diselesaikan - perdata - pidana	90% 90%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** **Tahun 2019** baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata 84.71%, pidana 90.84%).

- Analisa **penurunan** realisasi kinerja **persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 dikarenakan target persentase penyelesaian perkara sangat tinggi dibandingkan dengan target persentase penyelesaian perkara Tahun lalu (2018).
- Analisa **peningkatan** realisasi kinerja **persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 dikarenakan sisa perkara **pidana** tahun lalu (2018) relatif lebih sedikit dibandingkan sisa perkara **pidana** Tahun 2017.

- Analisa **keberhasilan** capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** Tahun 2019 dikarenakan tingkat disiplin dalam melaksanakan persidangan meningkat.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari keberhasilan capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** baik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** baik perkara pidana maupun perdata.

c. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	5% 30%	-85.71% -2.44%	-1714.2% -8.13%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$$

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

-Target persentase penurunan sisa perkara **perdata Tahun 2019** adalah **5%**, jumlah sisa perkara **perdata Tahun 2018** adalah **7** perkara, sisa perkara **perdata Tahun 2019** adalah **13** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\% = \frac{7 - 13}{7} \times 100\% = \frac{-6}{7} \times 100\% = -85.71\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{-85.71\%}{5\%} \times 100\% = -1714.2\%$$

- Target persentase penurunan sisa perkara **pidana Tahun 2019** adalah **30%**, jumlah sisa perkara **pidana Tahun 2018** adalah **41** perkara, sisa perkara **pidana Tahun 2019** adalah **42** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Tn.1}-\text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\% = \frac{41-42}{41} \times 100\% = \frac{-1}{41} \times 100\% = -2.44\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{-2.44\%}{30\%} \times 100\% = -8.13\% \Rightarrow 0\%$$

Perbandingan persentase penurunan sisa perkara Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

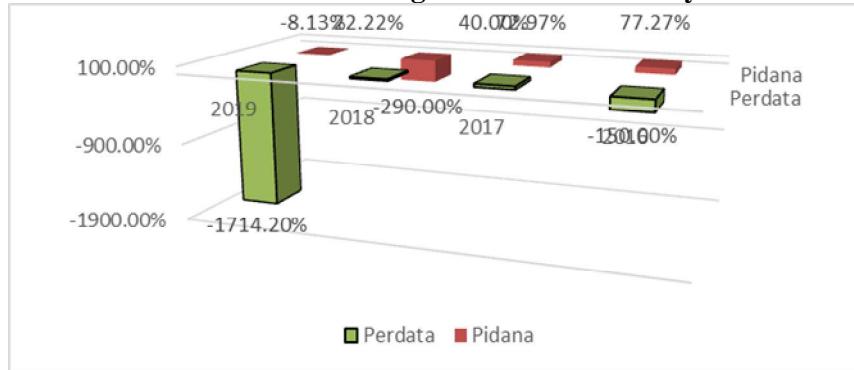
Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
209	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> 5% 30% 	<ul style="list-style-type: none"> -85.71% -2.44% 	<ul style="list-style-type: none"> -1714.2% -8.13%

2018	- Perdata - Pidana	4.70% 29.00%	22.22% -290.00%	472.81% 0%
2017	- Perdata - Pidana	4.40% 28.00%	40.00% 72.97%	909.09% 260.62%
2016	- Perdata - Pidana	4.10% 27.00%	-150.00% 77.27%	0% 286.20%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Sisa Tahun Berjalan
2019	- Perdata - Pidana	7 41	13 42
2018	- Perdata - Pidana	9 10	7 41
2017	- Perdata - Pidana	15 37	9 10
2016	- Perdata - Pidana	6 44	15 37

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja persentase penurunan sisa perkara **perdata dan pidana Tahun 2019** menurun.

Perbandingan **persentase penurunan sisa perkara** Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase penurunan sisa perkara. - Perdata - Pidana	5% 30%

Realisasi kinerja **persentase penurunan sisa perkara Tahun 2019** baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata -1714.2%, pidana—8.13%).

- Analisa **menurunnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase penurunan sisa perkara perdata maupun pidana Tahun 2019** dikarenakan sisa perkara **perdata maupun pidana Tahun 2019** terutama di akhir tahun banyak yang belum putus.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti maupun program/kegiatan penunjang sudah sangat tepat, penurunan capaian kinerja **persentase penurunan sisa perkara Tahun 2019** baik perkara pidana maupun perdata semata-mata perkara masuk diakhir tahun yang belum bisa putus namun sudah berjalan sesuai dengan court calendar yang ditetapkan.

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding			
- Perdata	95%	100%	105.26%
- Pidana	100%	97.42%	97.42%
- Kasasi			
- Perdata	98%	98.61%	100.62%
- Pidana	100%	98.36%	98.36%
- PK			
- Perdata	100%	100.00%	100%
- Pidana	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

-Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK perkara **perdata Tahun 2019** adalah **Banding 105.26%, kasasi 102.04%, PK 100%**, jumlah perkara **Banding Perdata Tahun 2018** adalah **0**, perkara **Kasasi Perdata Tahun 2019** adalah **0** perkara, perkara **PK Perdata Tahun 2019** adalah **0** perkara, sedangkan jumlah putusan perkara **Pidana Tahun 2019** adalah **72** perkara.

Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi :

- Banding: $\frac{\text{Jml Perkara yang tdk mengajukan banding} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$

- Kasasi : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Kasasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$

- PK : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan PK} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{72}{72} \times 100\% = 100\%$

Capaian

- Banding: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105.26\%$

- Kasasi: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{98\%} \times 100\% = 102.4\%$

- PK: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100.00\%}{100.00\%} \times 100\% = 100.00\%$

-Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK Perkara **Pidana Tahun 2019** adalah **Banding 100%, kasasi 100%, PK 100%**, jumlah perkara **Banding Pidana Tahun 2019** adalah **11**, perkara **Kasasi Pidana Tahun 2019** adalah **7** perkara, perkara **PK Pidana Tahun 2019** adalah **0** perkara, sedangkan jumlah putusan perkara **Pidana Tahun 2019** adalah **426** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi :

- Banding: $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Banding} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{415}{426} \times 100\% = 97.42\%$

- Kasasi : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Kasasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{419}{426} \times 100\% = 98.36\%$

- PK : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan PK} \times 100\%}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} = \frac{426}{426} \times 100\% = 100\%$

Capaian

- Banding: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{97.42\%}{100.00\%} = 97.42\%$
- Kasasi: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98.36\%}{100.00\%} = 98.36\%$
- PK: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100.00\%}{100.00\%} = 100.00\%$

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

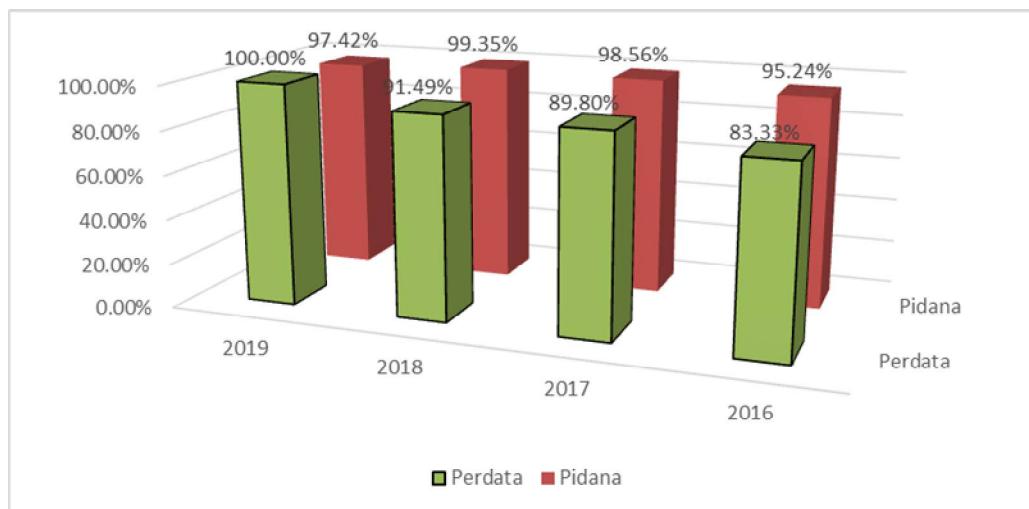
Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	Banding			
	- Perdata	95%	100%	105.26%
	- Pidana	100%	97.42%	97.42%
	Kasasi			
	- Perdata	98%	98.61%	100.62%
	- Pidana	100%	98.36%	98.36%
2018	PK			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
	Banding			
	- Perdata	93%	91.49%	98.38%
	- Pidana	100%	99.35%	99.35%
2017	Kasasi			
	- Perdata	95%	95.74%	100.78%
	- Pidana	100%	99.68%	99.68%
	PK			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2016	Banding			
	- Perdata	91%	89.80%	98.68%
	- Pidana	100%	98.56%	98.56%
	Kasasi			
	- Perdata	92%	100.00%	108.70%
	- Pidana	100%	98.97%	98.97%
2016	PK			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
	Banding			
	- Perdata	89%	83.33%	93.63%
	- Pidana	100%	95.24%	95.24%

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>PK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	89%	93.33%	104.87%
		100%	97.44%	97.44%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%

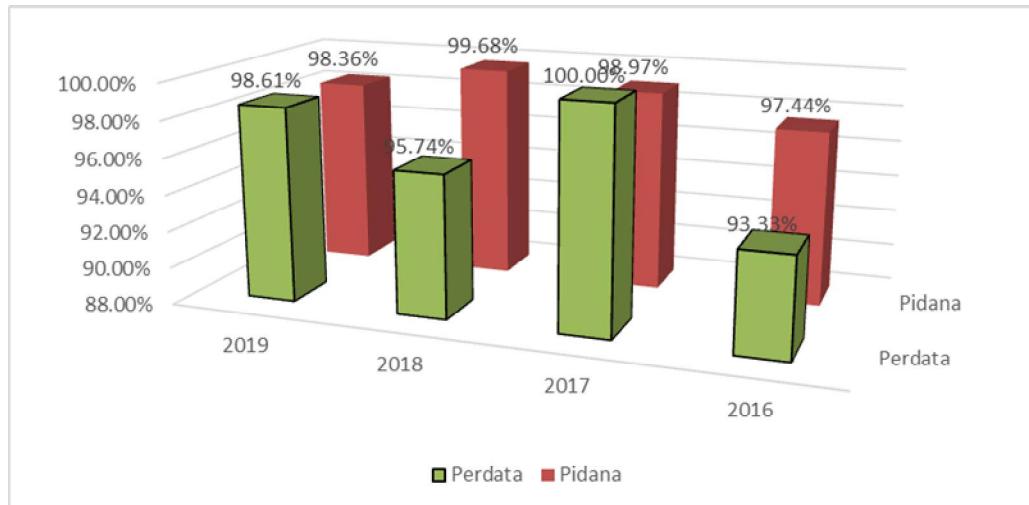
Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Banding	Kasasi	PK	Perkara Putus
2019	- Perdata	0	1	0	72
	- Pidana	11	8	0	426
2018	- Perdata	4	2	0	47
	- Pidana	2	1	0	308
2017	- Perdata	5	0	0	49
	- Pidana	7	5	0	486
2016	- Perdata	3	2	0	30
	- Pidana	13	7	0	273

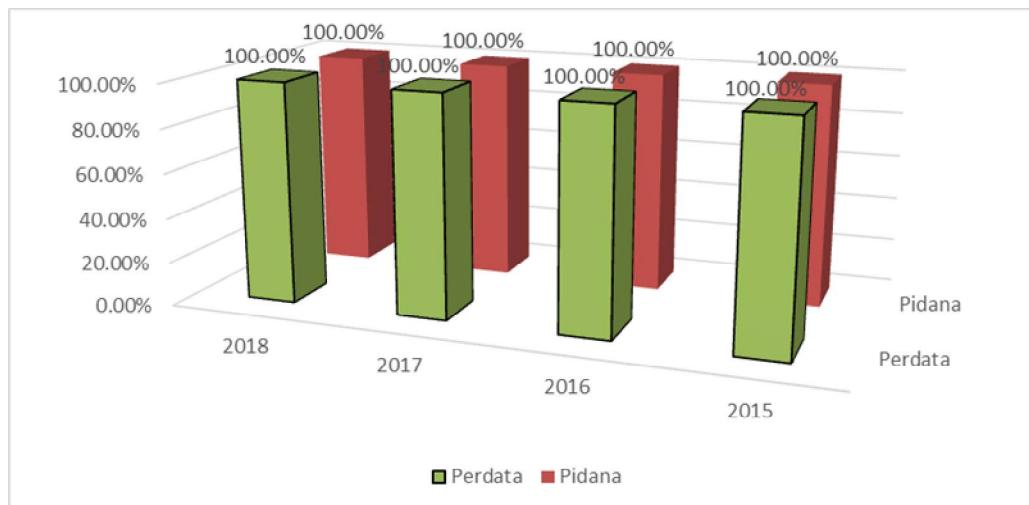
Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding** **Tahun 2019** meningkat (Tahun 2018 **91.49%**, Tahun 2019 **100%**). Capaian kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum

banding Tahun 2019 meningkat (Tahun 2018 **98.38%**, Tahun 2019 **105.26%**).

- Realisasi kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding Tahun 2019 menurun** (Tahun 2018 **99.35%**, Tahun 2018 97.42%). Capaian kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding Tahun 2018 menurun** (Tahun 2018 **99.35%**, Tahun 2019 97.42%).
- Realisasi kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi Tahun 2019 meningkat** (Tahun 2018 **95.74%**, Tahun 2019 98.61%). Capaian kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **Kasasi Tahun 2019 menurun** (Tahun 2018 **100.78%**, Tahun 2019 100.62%).
- Realisasi kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi Tahun 2019 menurun** (Tahun 2018 **99.68%**, Tahun 2019 98.36%). Capaian kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi Tahun 2019 menurun** (tahun 2018 **99.68%**, Tahun 2019 98.36%).
- Realisasi dan Capaian kinerja persentase perkara **perdata dan pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **PK Tahun 2019** dapat dikatakan **meningkat** dikarnakan persentase yang diperoleh 100%.

Perbandingan **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2019** dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <p>Banding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>PK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	96% 100% 98% 100% 100% 100%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum Banding Tahun 2019** baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (perdata **100%**, pidana **97.42%**).

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi Tahun 2019** baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (perdata 98.61%, perdata 98.36%).

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum PK Tahun 2019** baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (perdata **100%**, Pidana **100%**).

- Analisa **menurun dan meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum khususnya upaya hukum banding Tahun 2019** searah dengan

index kepuasan pencari keadilan atas putusan di Pengadilan Negeri Kota Agung.

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	11.11%	222.22%

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$$

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

-Target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2019 adalah **5%**, jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2019 adalah **36** perkara, yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2019 adalah **4** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jml Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = \frac{1 \times 100\%}{32} = 11.11\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{11.11\%}{5\%} \times 100\% = 222.22\%$$

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversitahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

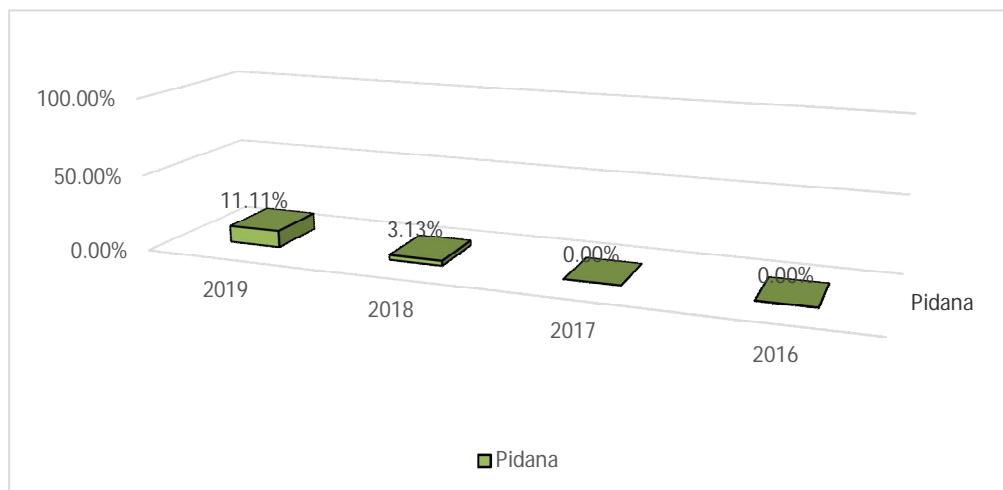
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	5%	11.11%	222.22%
2018	4.70%	3.13%	66.49%
2017	4.40%	0%	0%
2016	4.10%	0%	0%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Anak	Diselesaikan Dengan Diversi
2019	36	4
2018	32	1
2017	37	0
2016	26	0

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.



- Realisasi dan capaian kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2019 **meningkat**.

Perbandingan **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi** tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%

Realisasi kinerja **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi** Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (11.11%).

- Analisa **meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi** Tahun

2019 dikarenakan pada tahun sebelum di Pengadilan Negeri Kota Agung sudah pernah ada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

f. Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	96.8%	101.89%

Untuk rincian capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

-Target index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 adalah **95%**, Index kepuasan pencari keadilan dilakukan dengan cara memberikan quisoner kepada masyarakat pencari keadilan. Index kepuasan pencari keadilan diperoleh:

Realisasi: 96.8%

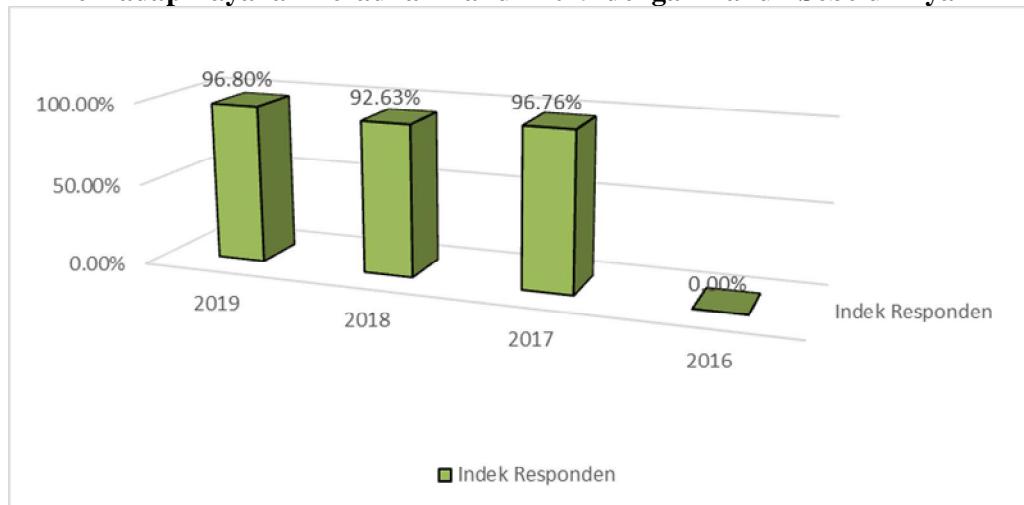
$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{96.8\%}{95\%} \times 100\% = 101.89\%$$

Perbandingan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	95.00%	96.8%	101.89%
2018	90.00%	92.63%	102.92%
2017	85.00%	82.25%	96.76%
2016	-	-	-

Grafik Perbandingan Realisasi Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 meningkat.

Perbandingan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%

Realisasi kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (96.8%).

- Analisa **meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 dikarenakan Tahun 2019 tingkat pelayanan baik sarana maupun pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung terus ditingkatkan dan mendapat respon positif dari para Pencari Keadilan.

Sasaran Strategis 2: **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ini diukur berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018 yangtercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 15% 100% Pengadilan Tidak ada Perkara Tipikor

Analisis keempat indikator kinerja sasaran strategis kedua ini sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu;**

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100%

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

-Target persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 adalah **100%**, jumlah perkara Tahun 2019 adalah **498** perkara terdiri dari **72** perkara perdata dan **426** perkara pidana. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% = \frac{498}{498} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} = \frac{100\% \times 100\%}{100\%} = 100\%$$

Perbandingan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

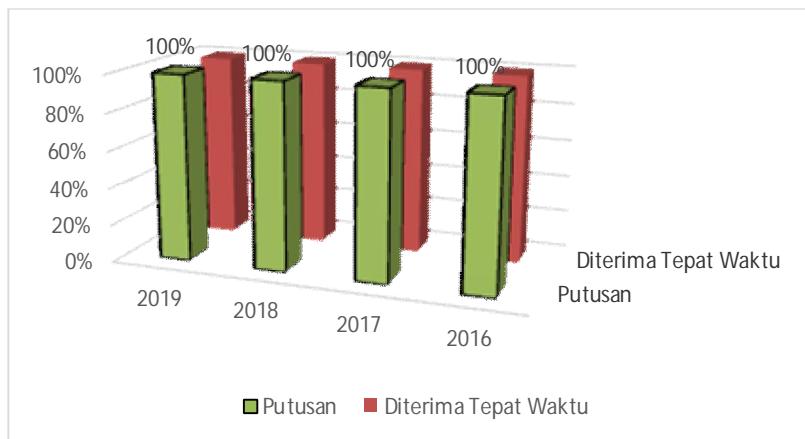
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	100%	100%	100%

2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Putusan	Diterima Tepat Waktu
2019	498	498
2018	355	355
2017	535	535
2016	303	303

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik Tahun 2019 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%

Realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada Tahun 2019 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2019 dikarenakan tingkat kedisiplinan dalam penyampaian isi putusan ke pada para pihak di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung sudah sangat baik.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	0%	0%

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

-Target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019 adalah **15%**, jumlah perkara Tahun 2019 yang dilakukan mediasi adalah **12** perkara, yang diselesaikan dengan mediasi Tahun 2019 adalah **Nihil** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jml Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi} \times 100\%}{\text{Jml Perkara yang dilakukan Mediasi}} = \frac{1 \times 100\%}{12} = 8.33\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{8.33\% \times 100\%}{14.00\%} = 59.52\%$$

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

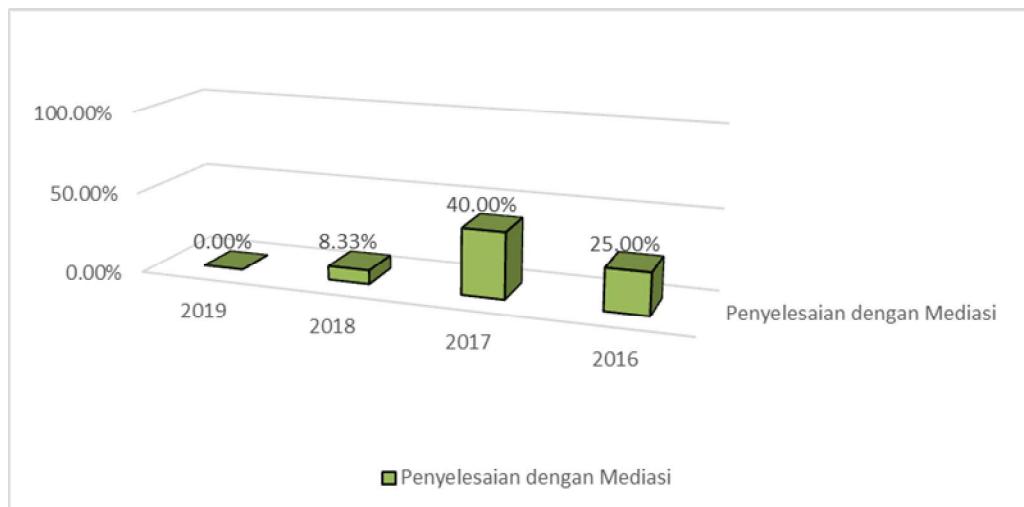
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	15%	0%	0%
2018	14%	8.33%	59.52%
2017	13%	40%	307.69%
2016	12%	25%	208.33%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara yang Mediasi	Diselesaikan Dengan Mediasi
2019	6	0
2018	12	1
2017	30	12
2016	4	1

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2019 menurun.

Perbandingan **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019** dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (15%).

- Analisa **menurunnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2019** dikarenakan Tahun 2019 para pihak dalam mediasi sebagian besar tidak diperoleh kesepakatan.

c. Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap
 $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$

-Target persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 adalah **100%**, jumlah Tahun 2019 adalah **498** perkara terdiri dari **72** perkara perdata dan **426** perkara pidana. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding,
Realisasi: _____ Kasasi dan PK Secara Lengkap _____ x 100% = 100% x 100% = 100%
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, _____ 100%
Kasasi dan PK

Capaian: Realisasi _____ x 100% = 100% x 100% = 100%
Target _____ 100%

Perbandingan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Banding, Kasasi dan PK	Lengkap dan Tepat Waktu
2019	20	20
2018	9	9
2017	17	17
2016	25	25

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik Tahun 2019 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

Realisasi kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada Tahun 2019 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2019 dikarenakan adanya control dari pihak terkait baik itu Panitera, Ketua Pengadilan dan pihak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja

Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang,}}{\text{di Upload dalam Website}} \times 100\% \\ \frac{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}}{\text{}} \\$$

Perkara Tindak Pidana Korupsi dil Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II di persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100.00%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100.00%	100%

Terpinggirkan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100%
---------------	---	------	---------	------

Analisis ketiga indikator kinerja sasaran strategis ketiga ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja

Utama Tahun 2019 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

-Target persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 adalah **100%**, jumlah prodeo Tahun 2019 adalah **0** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} = 100\%$$

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

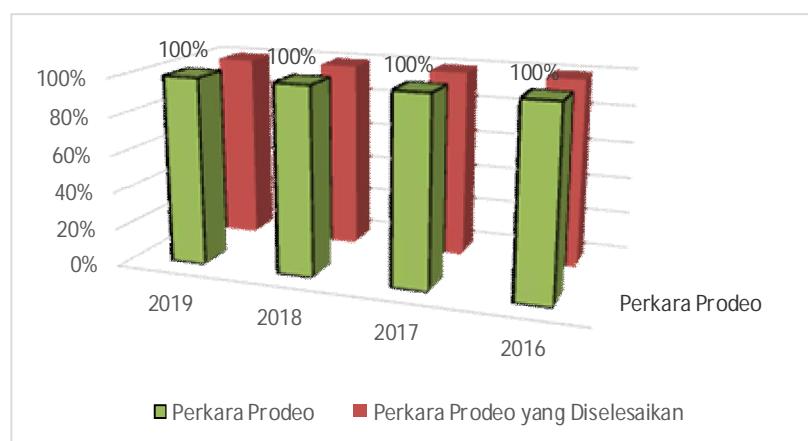
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Prodeo	Diselesaikan
2019	10	10
2018	8	8
2017	6	6
2016	6	6

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik Tahun 2019 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

Realisasi kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada Tahun 2019 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 dikarenakan serapan anggaran prodeo yang ada sudah terlaksana seluruhnya.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%

Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaat, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Kota Agung dikarnakan tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

-Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukumx 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)

- Pagu anggaran Posbakum Tahun 2019 Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Anggaran tersebut berupa Honor 1 orang Advokat Piket dengan total 240 jam layanan (Rp100.000,00/jam).
- Pada Tahun 2019 Pos Bakum Pengadilan Negeri Kota Agung menerima kunjungan masyarakat dan semua terlayani oleh petugas posbakum.
- Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 adalah **100%**, jumlah layanan Tahun 2019 adalah **10** orang. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu} \\ \text{Realisasi: } \frac{\text{yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum} \times 100\%}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = \frac{10 \times 100\%}{10} = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\% \times 100\%}{100\%} = 100\%$$

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Jml Pencari Keadilan Tertentu	Terlayani Posbakum
2019	10	10
2018	8	8
2017	6	6
2016	6	6

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik Tahun 2019 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

Realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada Tahun 2019 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Tahun 2019 dikarenakan serapan anggaran Posbakum yang ada sudah terlaksana seluruhnya.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Analisis keenam indikator kinerja sasaran strategis keempat ini sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi);**

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yaitu:

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :

BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

-Target Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 adalah **100%**, jumlah yang mengajukan eksekusi **3** perkara permohonan Tahun 2019 yang belum dijalankan eksekusinya 1 perkara, jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan **1** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjutix 100\%}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} = \frac{1 \times 100\%}{4} = 25\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{25\% \times 100\%}{100\%} = 25\%$$

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

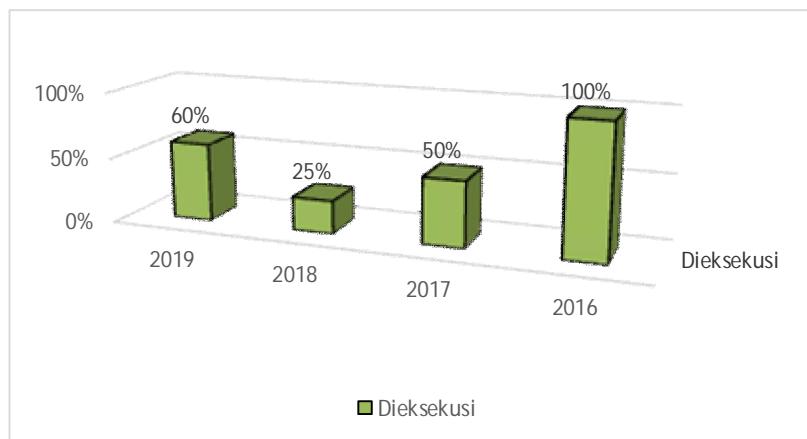
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	100%	25%	25%
2018	100%	25%	25%
2017	100%	50%	50%
2016	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Permohonan Tahun Lalu Yang Belum Dieksekusi	Yang Mengajukan Eksekusi	Dieksekusi
2019	2	3	3
2018	1	3	2
2017	0	2	1
2016	0	3	3

Grafik Perbandingan Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dikatakan **meningkat** hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian Tahun 2019 **60%** dan Tahun 2018 adalah **25%**.

Perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Realisasi kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 (25%) jika dibandingkan dengan target jangka (100%) menengah belum tercapai.

- Analisa belum tercapainya realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2019 dikarenakan 2 perkara lainnya menunggu koordinasi dari pihak pengamanan eksekusi.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Alokasi anggaran perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar **Rp0** realisasi anggarannya sebesar **Rp0 (0%)**, hal ini disebabkan pengajuan perkara prodeo dibiayai oleh anggaran Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
 - b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 tidak memperoleh anggaran siding di luar gedung pengadilan.
 - c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar **Rp24.000.000,00** realisasi anggarannya sebesar **Rp24.000.000,00 (100%)**

2. Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja Tahun 2019

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.470.378.097,00 dari pagu anggaran Rp3.498.989.000,00 (99.02%) dengan perincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 per program:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 Per Program

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.339.589.000	3.312.486.617	99.19	27.120.383	0.81
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38.000.000	37.500.000	98.68	500.000	1.32
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.400.000	120.409.480	99.18	990.520	10.80
Jumlah		3.498.989.000	3.470.378.097	99.02	28.519.903	0.98

Adapun rincian realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 per program sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.377.589.000	3.349.968.617	99.18	27.620.383	0.82
	Belanja Pegawai	2.444.171.000	2.421.170.047	99.07	23.000.953	0.93

	Belanja Barang Operasional	463.807.000	460.134.643	99.21	3.672.357	0.47
	Belanja Modal	38.00.000	37.500.000	98.68	500.000	1.32
	Jumlah	3.377.589.000	3.349.968.617	99.18	27.620.383	0.82

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai:

- Pagu Anggaran : Rp2.444.171.000
- Realisasi : Rp2.421.170.047
- Capaian : 99.07%

Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019
Belanja Pegawai

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.080.294.000	1.080.293.920	99.99	80	0.01
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.000	16.195	67.48	7.805	32.52
3	511121	Beban Tunj/ Suami/Istri PNS	80.736.000	80.394.348	99.58	341.652	0.42
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23.798.000	23.653.770	99.39	144.23	0.61
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	100	0	0.00
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	865.285.000	851.185.000	98.37	14.100.000	1.63
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	92.433.000	90.852.334	98.29	1.580.666	1.71
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	57.502.000	57.501.480	99.99	520	0.01
9	511129	Beban Tunj. Makan PNS	198.269.000	191.813.000	96.74	6.456.000	3.26
10	511151	Beban Tunjangan	17.690.000	17.320.000	97.91	370.000	2.09

Umum PNS						
Jumlah	2.444.171.000	2.421.170.047	99.07	23.000.953	0.93	

- Berdasarkan uraian di atas penyerapan anggaran Tahun 2019 untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.2.421.170.047 (99.07%) artinya penyerapan anggaran menurun dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 0.93%.
- Faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 adalah mutasi pegawai dan promosi di lingkungan pengadilan Negeri Kota Agung, berikut ini data mutasi pegawai di Pengadilan Negeri Kota Agung:

**Tabel Mutasi Keluar Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket.
1	Ansori Zulfika, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	Panitera Muda Perdata	
2	Joko Ciptanto, S.H., M.H.	Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri Kota Agung	Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri Pelalawan	
3	Hidayat Sunarya, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung	Panitera Pengadilan Negeri Tais	
4	Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pandeglang	

**Tabel Mutasi Masuk Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	23 Agustus 2019
2	Tetti Herawaty Saragih, S.H.	Staf Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	18 September 2019

**Tabel Promosi Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Bambang Setian, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Agung	19 Februari 2019
2	Wahyu Kadriansyah, A.Md.	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Agung	19 Februari 2019
3	Martha Diana, S.H., M.H.	Staf Keuangan Pengadilan Negeri Kota Agung	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung	5 Agustus 2019
4	Ratriningtias Ariani, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung	Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung	23 Oktober 2019

b) Belanja Barang Operasional:

- Pagu Anggaran : Rp.895.418.000
- Realisasi : Rp. 891.298.570
- Capaian : 99.53%

**Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019
Belanja Barang Operasional**

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	521111	Beban Keperluan Perkantoran	374.469.000	370.942.875	99.06	3.526.125	0.94
2	521811	Beban Persediaan Barang Konsumsi	35.893.000	35.892.869	99.9996	131	0.0004
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	374.469.000	370.942.875	99.06	3.526.125	0.94
4	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.200.000	7.063.000	98.10	137.000	1.90
5	522111	Beban Langganan Listrik	67.200.000	66.782.987	99.38	417.013	0.62
6	522112	Beban Langganan Telepon	1.800.000	1.094.952	98.11	21.048	1.16
7	522113	Beban Langganan Air	30.0646.000	30.645.600	99.999	400	0.001
8	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.340.000	108.340.00	100	0	0
9	529119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.600.000	9.600.000	100	0	0
10	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.116.000	127.107.870	99.99	8.130	0.01
11	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.720.000	51.720.000	100	0	0
12	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30.418.000	30.408.768	99.97	9.232	0.03
13	524111	Belanja Perjalanan Biasa	51.700.000	51.699.649	99.99	351	0.01
Jumlah			895.418.000	891.298.570	99.53	4.119.430	0.47

- Berdasarkan uraian diatas penyerapan anggaran Tahun 2019 untuk Belanja Barang Operasional sebesar Rp.460.134.643 (99.21%) artinya penyerapan anggaran meningkat dari Tahun 2018 (96.29%) dikarenakan

belanja jasa berupa langganan listrik, telepon, internet dan PDAM tidak dapat terserap dengan maksimal.

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2019 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38.000.000	37.500.000	98.68	500.000	1.32
	Belanja Modal	38.000.000	37.500.000	98.68	500.000	1.32
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000	37.500.000	98.68	500.000	1.32
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	186.400.000	186.340.000	99.97	60.000	0.03
	Sarana Prasarana Pendukung SIPP	38.000.000	37.500.000	98.88	500.000	1.12

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2019 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.400.000	120.409.480	99.18	990.520	0.82
	Belanja Barang Non-Operasional	121.400.000	120.035.100	89.87	1.364.900	1.13
Jumlah		121.400.000	120.409.480	99.18	990.520	0.82

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA (03) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

a) Belanja Barang Non Operasional:

- Pagu Anggaran : Rp.121.400.000
- Realisasi : Rp.120.035.100
- Capaian : **89.87.%**

Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 Belanja Barang Non-Operasional

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	100	0	0.00
2	521211	Beban Bahan	57.920.000	57.883.600	99.94	36.400	0.06
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14.000.000	13.866.000	99.04	134.000	0.95
4	524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.620.000	18.620.000	100	0	0.00
5	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.860.000	5.665.500	82.59	1.194.500	17.41
Jumlah			121.400.000	120.035.100	98.87	1.364.900	1.13

- Berdasarkan uraian diatas penyerapan Anggaran DIPA (03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2019 untuk Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. **120.035.100 (98.87%)** artinya penyerapan anggaran menurun dari Tahun 2018 (98.20%).
- Faktor penyebab menurunnya realisasi anggaran adalah terdapat biaya pembebasan perkara yang dibiayai oleh Kemenkumham.

b. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 per jenis belanja:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 Per Program

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.565.692.000	2.565.459.727	99.99	332.273	0.01
2	Belanja Barang	720.504.000	710.645.579	98.63	9.858.426	1.37
3	Belanja Modal	375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18
Jumlah		3.661.596.000	3.650.847.221	99.70	10.748.779	0.29

c. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 per Sumber Anggaran:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 Per Sumber Anggaran

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Dipa Badan Urusan Administrasi (01)	3.377.589.000	3.349.968.617	99.18	27.620.383	0.81
2	Dipa Badan Peradilan Umum (03)	121.400.000	120.035.000	98.87	1.264.900	113
Jumlah		3.498.989.000	3.470.003.717	99.17	28.985.283	0.83

A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2019, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 ini menyampaikan terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKjIP Tahun 2011 dan 2012. Tahun 2019 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja Tahun 2019 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core business* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh

kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Kota Agung.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Agung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Negeri Kota Agung, karena Rencana Kinerja Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.
7. Pengadilan Negeri Kota Agung mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung.
8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Negeri Kota Agung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Kota Agung. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang

ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.

4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Negeri Kota Agung mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain:
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2019 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.